

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja Dinas Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 merupakan pencapaian tahun 2023 untuk periode 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Produksi sector perikanan terhadap PDRB
2. Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)
3. Nilai AKIP Dinas kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan

Sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 ditetapkan 3 sasaran dengan 3 indikator sasaran yang akan diwujudkan dalam Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produktivitas Perikanan
2. Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP

Untuk menilai pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja:

1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)
2. Skor Pola Pangan Harapan (Skor)
3. Nilai LHE AKIP DKPKP

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Capaian Kontribusi Produksi Sektor Perikanan terhadap PDRB Tahun 2023 adalah Rp. 71.218.685.419,- dari target Rp. 72.250.000.000,-, sehingga capaian kinerjanya Sangat Berhasil (99%)
2. Capaian Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 adalah 83,57 dari target 83, sehingga

capaian kinerjanya Sangat Berhasil (101%)

3. Capaian Nilai AKIP Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan pada Tahun 2023 adalah 63,55 dari target 72, sehingga capaian kinerjanya Sangat Berhasil (97%)

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator sasaran Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Capaian persentase peningkatan produksi perikanan Tahun 2023 sebesar 0,85% dari target 0,5%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator sasaran peningkatan produksi perikanan Sangat Berhasil (170%)
2. Capaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2023 adalah 94,90 dari target sebesar 80. Sehingga bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator sasaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Sangat Berhasil (119%)
3. Capaian Nilai LHE AKIP Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023 adalah 63,55 dari target 89,92. Sehingga bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator sasaran Nilai LHE AKIP Cukup Berhasil (71%)

Keberhasilan capain kinerja tahun 2023 di dukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
program Peningkatan Ketahanan Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan
6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
8. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Untuk mewujudkan kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran total anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 14.713.533.236,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp. 7.586.347.381,00 atau sebesar 51,56%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai bentuk atau media pertanggungjawaban Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran selama Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan pangan dan urusan pemerintahan kelautan dan perikanan di Kabupaten Pangandaran serta bermanfaat bagi seluruh Aparat Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Pangandaran.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Cijulang, 2 Februari 2024
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan
Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran



SARLAN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19780612 200801 1 007

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. MAKSUD DAN TUJUAN 1

 C. DASAR HUKUM 1

 D. GAMBARAN UMUM DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 3

 E. POTENSI 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 12

 A. RENCANA STRATEGIS 12

 B. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA..... 13

 C. PROGRAM DAN KEGIATAN 14

 D. PERJANJIAN KINERJA 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

 A. PENGUKURAN KINERJA..... 17

 B. CAPAIAN KINERJA..... 18

 B.1.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022, Tahun 2021 dan Tahun 2020..... 23

 B.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah..... 25

 B.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Provinsi dan Nasional 26

 B.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Altrernatif Solusi yang Telah Dilakukan..... 27

 C. AKUNTABILITAS ANGGARAN 32

 D. EFISENSI SUMBER DAYA..... 35

BAB IV PENUTUP 36

LAMPIRAN 37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Aset Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023 .. 5

Tabel 2 Data Produksi Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2023 5

Tabel 3 Data Produksi Perairan Umum Darat Tahun 2023..... 6

Tabel 4 Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pangandaran s.d Tahun 2023 6

Tabel 5 Data Potensi dan Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2023..... 7

Tabel 6 Data Potensi Perairan Umum Tahun 2023 8

Tabel 7 Data Jumlah Kapal Perikanan Tahun 2023..... 9

Tabel 8 Jumlah Kelompok Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 202310

Tabel 9 Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Tingkat Kerawanan Pangan.....10

Tabel 10 Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan103

Tabel 11 Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan.....103

Tabel 12 Sasaran Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan.....104

Tabel 13 Program Kerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan.....104

Tabel 14 Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023106

Tabel 15 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama.....109

Tabel 16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran.....10

Tabel 17 Perhitungan Skor PPH.....210

Tabel 18 Target dan Capaian Program.....210

Tabel 19 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama.....23

Tabel 20 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran.....24

Tabel 21 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama dengan Target Jangka Menengah25

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran dengan Target Jangka Menengah.....26

Tabel 23 Perbandingan Capaian Indeks Ketahanan Pangan27

Tabel 24 Perbandingan Capaian Skor Pola Pangan Harapan.....27

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi32

Tabel 26 Daftar Kegiatan dan Sumber Anggaran.....33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama23

Gambar 2 Grafik Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama.....24

Gambar 3 Diagram Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran24

Gambar 4 Grafik Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran.....25

Gambar 5 Diagram Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama dengan Terget Jangka
Menengah25

Gambar 6 Diagram Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran dengan Target Jangka
Menengah26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi DKPKP Kabupaten Pangandaran37

Lampiran 2 Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja.....38

Lampiran 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta Target Tahunannya.....42

Lampiran 4 Perjanjian Kinerja Esselon II dan Esselon III45

Lampiran 5 Rekap Laporan Kinerja/Program Tahun 202355

Lampiran 6 Laporan Evaluasi Renja Tahun 2023.....65

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis pada tahun 2023 penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan perwujudan kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dalam LKJiP Dinas Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran tahun 2023 berupa pengungkapan tahapan dan proses yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis, baik perencanaan kinerja, cara dan strategi pencapaian, metode pengukuran, analisa dan evaluasi serta rekomendasi untuk perbaikan dimasa mendatang. Adapun tujuan penyusunan LKJiP ini antara lain adalah:

- a. Memberikan informasi capaian kinerja, tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Dinas Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sektor Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan
- b. Sebagai media evaluasi kinerja Dinas Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023.

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan tahun 2023 mengacu pada:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan.

D. GAMBARAN UMUM DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Struktur Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan, Perikanan dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan bertugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub-Koordinator Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
 1. Sub-Koordinator Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI
- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
 1. Sub-Koordinator Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan

- e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - 1. Sub-Koordinator Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan
 - 2. Sub-Koordinator Distribusi dan Ketersediaan Pangan
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Jumlah pegawai Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran sebanyak 34 orang, dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

- 1) Sumberdaya Manusia Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan berdasarkan Golongan antara lain:
 - a. Golongan IV sebanyak 2 orang, terdiri dari :
 - Golongan IV/a = 2 orang
 - Golongan IV/b = 0 orang
 - Golongan IV/c = 0 orang
 - b. Golongan III sebanyak 31 orang, terdiri dari :
 - Golongan III/a = 21 orang
 - Golongan III/b = 3 orang
 - Golongan III/c = 4 orang
 - Golongan III/d = 3 orang
 - c. Golongan II sebanyak 1 orang, terdiri dari :
 - Golongan II/b = 0 orang
 - Golongan II/c = 1 orang
 - Golongan II/d = 0 orang
- 2) Sumberdaya Manusia Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan berdasarkan Tingkat Pendidikan antara lain:
 - a. Pascasarjana (S2) sebanyak 2 orang
 - b. Sarjana (S1) sebanyak 24 orang
 - c. Diploma sebanyak 7 orang
 - d. SMA/ sederajat sebanyak 1 orang
- 3) Sumberdaya Manusia Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan berdasarkan Eselon antara lain:
 - a. Eselon II sebanyak 1 orang
 - b. Eselon III sebanyak 3 orang
 - c. Eselon IV sebanyak 1 orang
 - d. Non eselon sebanyak 29 orang
- 4) Aset/modal yang dimiliki Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Aset Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023

No	Barang Pakai Habis	Saldo per 31 Desember 2023	Saldo per 31 Desember 2022	Kenaikan/penurunan	(%)
		(Rp)	(Rp)		
1	Alat Tulis Kantor	1.455.440,00	2.729.155,00	(1.273.715,00)	(46,67)
2	Bahan Cetak	38.788.475,00	73.181.135,00	(34.392.660,00)	(47,00)
3	Perabot Kantor	0	1.485.000,00	(1.485.000,00)	(100,00)
4	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.933.500,00	38.300,00	10.895.200,00	28447%
5	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	65.412.291,00	0	65.412.291,00	100,00
6	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	333.033.250,00	333.033.250,00	0	0
7	Natura dan Pakan Lainnya	128.724.600,00	0	128.724.600,00	100,00
8	JUMLAH	578.347.556,00	410.466.840,00	167.880.716,00	41%

E. POTENSI

Keberagaman sumberdaya di Kabupaten Pangandaran memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ekonomi produktif. Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Pangan sebanyak 13 unit dengan jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 sebanyak 2.579,60 Ton. Panjang pantai di Kabupaten pangandaran yaitu 91 km dengan jumlah nelayan yang ada sebanyak 3810 orang. Kondisi potensi perikanan tangkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Data Produksi Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jml. TPI (Unit)	Produksi (Kg)	Juml. Nelayan (Org)
1	Cimerak		121.003,74	379
	- TPI Legokjawa	1		
	- TPI Muaragatah	1		
	- TPI Madasari	1		
2	Cijulang		948.191,33	456
	- TPI Batukaras	1		
	- TPI Nusawiru	1		
	- TPI Sanghiangkalang	1		
3	Parigi		428.137,70	633
	- TPI Bojongsalawe	1		
4	Cigugur	-	-	12
5	Langkaplancar	-	-	7
6	Sidamulih	-	-	65
7	Pangandaran		1.031.526,70	1.525
	- TPI Cikidang	1		
	- TPI Pangandaran	1		
	- TPI Jongurbatu	1		
8	Kalipucang		9.942,22	489
	- TPI Ciawitali	1		
	- TPI Majingklak	1		
	- TPI Palataragung	1		
9	Padaherang	-	-	225
10	Mangunjaya	-	-	19
Total		13	2.538.801,69	3.810

Sumber data: Bidang Perikanan Tangkap DKPKP

Tabel 3. Data Produksi Perairan Umum Darat Tahun 2023

No.	Jenis Ikan	Jumlah (Kg)
1	Tawes	2.559
2	Gabus	187
3	Keting	22
4	Caung	2.084
5	Udang Galah	8.559
6	Udang Rawa	1.788
7	Kakap	487
8	Sili	-
9	Belut	-
10	Lubang	91
11	Mujaer	15.532
12	Nila	5.096
13	Lukas	80
14	Nilem	40
15	Terusan	-
16	Betik	-
17	Paray	932
18	Bereum Panon	587
19	Betutu / Boboso	120
20	Putihan	584
21	Wader	1.543
22	DII	507
Jumlah		40.798

Sumber data: Bidang Perikanan Tangkap DKPKP

Tabel 4. Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pangandaran s.d Tahun 2023

No.	Kecamatan	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap			
		RTP	RTBP	Nelayan	Bakul
1.	Cimerak	98	281	379	12
2.	Cijulang	318	138	456	11
3.	Parigi	295	338	633	9
4.	Sidamulih	0	65	65	-
5.	Pangandaran	798	727	1.525	29
6.	Kalipucang	104	385	489	22
7.	Mangunjaya	14	5	19	-
8.	Padaherang	180	45	225	-
9.	Cigugur	-	12	12	-
10.	Langkap lancar	-	7	7	-
Jumlah		1.807	2.003	3.810	82

RTP : Rumah Tangga Perikanan (Pemilik atau Pemilik Merangkap Pekerja)
RTBP : Rumah Tangga Buruh Perikanan (Pekerja/ABK)

Sumber data: Bidang Perikanan Tangkap DKPKP

Potensi perikanan budidaya Kabupaten Pangandaran meliputi jumlah pembudidaya ikan sebanyak 5.587 orang yang tergabung dalam Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) sebanyak 296 kelompok, dengan jumlah produksi total sebanyak 326,057 ton. Data potensi perikanan budidaya disajikan pada tabel berikut.

NO	Kecamatan	Jumlah POKDAKAN	Jumlah Anggota POKDAKAN	LUAS LAHAN (m)	JUMLAH PRODUKSI (Ton)
1	Mangunjaya	15	529	678.713	17,63
2	Padaherang	36	788	46.934	2,495
3	Kalipucang	25	249	64.582	9,767
4	Pangandaran	49	462	70.745	57,903
5	Sidamulih	27	611	340.060	8,473
6	Parigi	40	977	321.586	58,486
7	Cigugur	13	420	270.673	72,182
8	Cijulang	33	257	73.241	5,18
9	Cimerak	20	168	32.027	91,635
10	Langkaplancar	38	1.126	72.693	2,306
JUMLAH TOTAL		296	5.587	1.971.254	326,057

Sumber data: Bidang Perikanan Budidaya DKPKP

Perairan umum juga memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk kegiatan perikanan. Perairan Umum Daratan (PUD) yang meliputi danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya, dengan luas sekitar 102.100 m² dan panjang sungai 127,67 km. Potensi perairan umum yang dapat dikembangkan untuk kegiatan perikanan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Data Potensi Perairan Umum Tahun 2023

No.	Kecamatan	Desa	Penebaran Benih Ikan		
			Nama Perairan	Luasan	Jenis Ikan Yang dibutuhkan
1.	Cijulang	Kertayasa	Sungai Green Canyon	2,5 Km	Nila, Nilem, Mas, Tawes,
		Kondangjajar	- Saluran Cipasung - Sungai Citerusan - Sungai Kalensari - Sungai Sidangmangu	4 Km 4 Km 2 Km 3 Km	Nila, Nilem, Mas, Tawes,
2.	Cimerak	Kertamukti	Sungai Cibening	3 Km	Nila, Nilem, Mas, Tawes,
		Legokjawa	- Sungai cidadap - Sungai Cipeuteuy - Sungai Surupan - Sungai Picung - Sungai Situ Gede - Embung Rancakepuh	300 m 5 Km 1 Km 1,87 Km 400 m	Nila, Nilem, Mas, Tawes,
3.	Parigi	Selasari	- Sungai Santirah - Sungai Jambusari - Sungai Goa Lanang - Sungai Kedung Ori	1,5 Km 800 m 2 km 1,2 Km	Nila, Nilem, Mas, Tawes,
		Cintaratu	Sungai Jojogan	4 Km	Nila, Nilem, Mas, Tawes,
		Ciliang	Sungai Cikelewung	12 Km	Nila, Nilem, Mas, Tawes,
4.	Kalipucang	Kalipucang	Sungai Kalipucang	1,5 Km	Nila, Nilem, Mas, Tawes,
		Ciparakan	Sungai Ciparakan	1,5 Km	Nila, Nilem, Mas, Tawes,
		Cibuluh	- Sungai Dahon Malang - Rawa Dahon Malang	1,5 Km 10 Ha	Nila, Mas, Patin
5.	Sidamulih	Cikalong	- Embung Cijumleng - Embung Jebulan - Embung Balakbak	850 m ² 500 m ² 750 m ²	Nila, Mas, Nilem
		Sidamulih	- Sungai Cibeureum - Sungai Cibungur	1 Km 2,1 Km	Nila, Mas, Nilem
6.	Langkaplancar	Karangkamiri	- Sungai Cicepak - Sungai Citamelang	12 Km 5 Km	Nila
		Jadikarya	- Sungai Ciluntung - Sungai Kalijago - Sungai Cisit	2 Km 2 Km 2 Km	Nila, Mas, Nilem, Patin
		Cisarua	- Sungai Cicepak	1 Km	
7.	Mangunjaya	Jangraga	- Ranca Cikelud - Ranca Kemandilan - Ranca Bojongsari - Sungai Cikaso	2,5 Km 2,5 Km 2,5 Km 2,5 Km	Nila, Mas, Nilem, Baung
		Mangunjaya	- Sungai Cikaso	2,5 Km	
8	Padaherang	Maruyungsari	- Sungai Mati - Sungai Apur	2,5 Km 1 Km	Nila, Mas, Nilem
		Ciganjeng	- Sungai Cirapuan - Sungai Ciganjeng	3 Km 0,5 Km	

			- Sungai Ciseuri	0,5 Km	
		Paledah	- Kali Apur	3 Km	
9.	Pangandaran	Babakan	- Sungai Bugel	2 Km	Nila, Tawes, Nilem
10	Cigugur	Bunisari	- Sungai Cipendey	2 Km	Nila, Tawes, Nilem, Mas
			- Embung Cioe	2 Km	
		Cimindi	- Sungai Cijulang	3 Km	Nila, Tawes, Nilem, Lele
			- Sungai Ciwayang	5 Km	
			- Sungai Batu Jajar	2 Km	
		Harumandala	- Sungai Cirahuman	2 Km	Nila, Tawes, Nilem
			- Sungai Cibatu	2 Km	
			- Ngurung	2 Km	
			- Sungai Cimandala	2 Km	
			- Sungai Citajur		

Potensi sarana dan prasaraan perikanan tangkap yang mencakup potensi kapal dan alat penangkap ikan serta tempat pelelangan ikan. Jumlah kapal dan alat penangkap ikan sebanyak 1962 unit. Sementara itu, jumlah tempat pelelangan ikan tercatat sebanyak 13 TPI. Data jumlah kapal perikanan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 7. Data Jumlah Kapal Perikanan Tahun 2023

No	Kecamatan	Kapal <5 GT	Kapal 5-10 GT	Kapal 10-20 GT	Kapal 20-30 GT	Kapal >30 GT	Jum.
1	Cimerak	95	-	-	-	-	95
2	Cijulang	284	1	3	1	1	290
3	Parigi	309	-	-	-	1	310
4	Pangandaran	1081	23	2	1	6	1.113
5	Kalipucang	154	-	-	-	-	154
Total		1.923	24	5	2	8	1.962

Sumber data: Bidang Perikanan Tangkap DKPKP

Keberadaan beberapa kelompok masyarakat mitra seperti Kelompok Lumbung, Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Pengolah (Poklah) dan lainnya juga juga memiliki potensi yang cukup besar dalam pencapaian kinerja dalam sektor perikanan kelautan dan ketahanan pangan di Kabupaten Pangandaran. Terdapat 787 kelompok dan 9 koperasi yang menjadi mitra kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Jumlah Kelompok Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

No.	Kecamatan	Kelompok							Koperasi
		LPM	KWT	Pokdakan	KUB	Poklahsar	Kugar	Gapokkan	
1.	Cimerak	10	4	15	17	-	3	-	3
2.	Cijulang	9	2	36	29	2	-	-	2
3.	Cigugur	8	4	25	-	-	-	-	-
4.	Langkaplancar	9	5	49	-	-	-	-	-
5.	Parigi	26	4	27	30	1	-	1	1
6.	Sidamulih	34	1	40	3	-	-	1	-
7.	Pangandaran	11	4	13	134	16	-	2	1
8.	Kalipucang	10	2	33	24	1	-	-	2
9.	Padaherang	34	7	20	4	-	-	-	-
10.	Mangunjaya	35	3	38	-	-	-	1	-
Total		184	36	296	241	20	3	5	9

Sejumlah potensi dalam pengembangan bidang perikanan, kelautan dan ketahanan pangan ini didukung oleh kebijakan pemerintah daerah antara lain tercermin dari dokumen perencanaan, dari mulai RPJP, RPJM hingga RKP. Demikian pula dengan posisi Kabupaten Pangandaran yang masih memiliki potensi dan peluang untuk terus mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, termasuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya dalam pemenuhan kebutuhan pangan hewani masyarakat.

Di samping potensi pengembangan, Kabupaten Pangandaran juga memiliki ancaman potensi seperti masih adanya lokasi rawan pangan yang apabila tidak diantisipasi dengan baik akan berpengaruh terhadap pembangunan perikanan di Kabupaten Pangandaran. Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Tingkat Kerawanan Pangan Di Kabupaten Pangandaran pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Tingkat Kerawanan Pangan di Kabupaten Pangandaran

Kecamatan	Prioritas (Jumlah Desa)						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
Cimerak				6	4	1	11
Cijulang					4	3	7
Cigugur				6	1		7
Langkaplancar			1		8	6	15
Parigi					9	1	10
Sidamulih				3	3	1	7
Pangandaran				1	6	1	8
Kalipucang				1	5	3	9
Padaherang					10	4	14
Mangunjaya				4		1	5
Jumlah	0	0	1	21	50	21	93

Sumber data: Bidang Ketahanan Pangan

Dalam upaya penanggulangan kerawanan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Bidang Ketahanan Pangan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan telah mengembangkan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang ada di Kabupaten Pangandaran berjumlah 184 kelompok. Pengembangan lumbung pangan masyarakat dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan cadangan pangan masyarakat sebagai dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Cadangan pangan masyarakat memiliki dua fungsi, yakni fungsi sosial sebagai cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan pada saat kondisi darurat seperti bencana alam dan paceklik, serta fungsi ekonomi di mana ketika produksi berlimpah dapat disimpan di lumbung dan pada saat harga sudah normal dapat dijual.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, Rencana pembangunan kelautan perikanan dan ketahanan pangan Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu 5 tahun kedepan telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan. Renstra Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis kebijakan rencana program 5 (lima) tahun ke depan.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran mewujudkan kinerja yang mendukung terhadap Misi Kabupaten Pangandaran, yaitu :

- Misi Ke 4 yaitu "Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal". Misi keempat dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengembangkan sistem pembiayaan daerah terpadu.
- Misi Ke 5 "Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, Dan Akuntabel". Misi kelima Dimaksudkan untuk Menciptakan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisien serta Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam Upaya mendukung misi Kabupaten Pangandaran, Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran menyusun Tujuan dan Sasaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran 2021-2026. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026.

Secara rinci Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran yang mendukung misi Kabupaten Pangandaran adalah sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel.

Tabel 10. Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran

NO	Misi Kabupaten	Tujuan Kabupaten	Tujuan Dinas	Indikator Tujuan Dinas	Sasaran Dinas
1	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi Produksi sector perikanan terhadap PDRB (Milyar Rupiah)	Meningkatkan Produktivitas Perikanan
				Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, Dan Akuntabel	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP

B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Berdasarkan misi di atas, dikembangkanlah rencana strategis dalam bentuk Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan. Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan inilah yang akan menjadi dasar dalam upaya mencapai misi Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan
Misi 4 : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal			
1.	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sector unggulan	Kontribusi Produksi sector perikanan terhadap PDRB (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah
		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks

		(Indeks)	
Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, Dan Akuntabel			
2.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	Nilai

Tabel 12. Sasaran Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan
Misi 4 : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal			
1.	Meningkatkan Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	%
2.	Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	Skor
Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, Dan Akuntabel			
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP	Nilai LHE AKIP DKPKP	Nilai

C. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 13. Program Kerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan

No	PPROGRAM	KINERJA		ANGGARAN (Rp)
		INDIKATOR	TAR GET	
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,30	5.979.455.917
2.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan	5	16.248.250
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0,20	3.721.362.644
4.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase penyediaan pasar terhadap produksi hasil perikanan	90	123.414.950
5.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk	Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	8	252.881.217

	Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan			
6.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Angka Kecukupan Energi 2. Angka Kecukupan Protein	1. 2.100 2. 57	203.093.323
7.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah)	4%	111.960.800
8.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman	60	12.956.000
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	1. 90% 2. 90% 3. 90% 4. 90%	4.292.160.135

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perhanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata. Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan satuan kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang harus dilaksanakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Penyusunan PK Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Target Kinerja Program, Taret Kinerja Kegiatan dan Laporan Anggaran per sasaran secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 14. Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023

A. Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan Startegis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sector unggulan	Kontribusi Produksi sector perikanan terhadap PDRB (Milyar Rupiah)	72,2
		Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	83
2.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance)	Nilai SAKIP	69,25-72,00

B. Indikator Sasaran

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	0,5
2.	Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	80
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP	Nilai LHE AKIP DKPKP	89,93

C. Program

No	Program Startegis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,30
2.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan	5
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0,20
4.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase penyediaan pasar terhadap produksi hasil perikanan	90
5.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	8
6.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Angka Kecukupan Energi 2. Angka Kecukupan Protein	1. 2.100 2. 57
7.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah)	4%
8.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman	60
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	1. 90% 2. 90% 3. 90% 4. 90%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta Perjanjian Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023. Pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran kinerja sebagai alat manajemen untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran. Nilai capaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi dengan target sasaran kinerja yang direncanakan dikali dengan 100%.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran menggunakan peraturan yang ada. Pertama, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja indikator sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, kedua, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

- 1. > 85 : Sangat Berhasil
- 2. 70 < X > 80 : Berhasil
- 3. 55 < X > 70 : Cukup Berhasil
- 4. < 50 : Tidak Berhasil

3.2 CAPAIAN KINERJA

Capaian Target indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023 menggambarkan pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam mencapai sasaran. Pengukuran realisasi kinerja tahun tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari tiap-tiap bidang di Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran sedangkan dokumen-dokumen yang menjadi sumber data sebagai berikut:

Tabel 15. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	72.25	71.21	99	Sangat Berhasil
2	Indeks Ketahanan Pangan	Point	83	83,57	101	Sangat berhasil
3	Nilai SAKIP	%	72	63,55	97	Sangat Berhasil

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 4 RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, maka Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan menetapkan tujuan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sektor Unggulan yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB dan Indeks Ketahanan Pangan.

Berdasarkan hasil pendataan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan bahwa capaian Produksi Sektor Perikanan Tahun 2023 adalah Rp. 71.218.685.419,- dari target Rp. 72.250.000.000,-, sehingga capaian kinerjanya Sangat Berhasil (99%). Sedangkan capaian Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 adalah 83,57 dari target 83, sehingga capaian kinerjanya Sangat Berhasil (101%).

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 5 RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 yaitu Tujuan 5: Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima, maka Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan menetapkan tujuan sebagai berikut: Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan indikator tujuan Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam dalam sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Nilai AKIP Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan pada Tahun 2023 ditargetkan 72 dan realisasinya 63,55. Dalam Kertas Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan pada Tahun 2023 memiliki nilai 69,65.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan, diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja sasaran kelima adalah sangat baik, dengan rata-rata presentase capaian sasaran sebesar 97 % (Sangat Berhasil).

Tabel 16. Target dan Realisasi Indikator Sasaran

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	%	0,5	0,85	170	Sangat Berhasil
2	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	Skor	80	94,90	119	Sangat Berhasil
3	Nilai LHE AKIP DKPKP	%	89,92	63,55	71	Cukup Berhasil

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 4 RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, maka Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan menetapkan tujuan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sektor Unggulan yang dijabarkan dalam sasaran Meningkatkan Produktivitas Perikanan.

Produksi perikanan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup tinggi khususnya pada perikanan tangkap. Dari hasil pendataan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan diperoleh data produksi sebagai berikut :

- Produksi Perikanan Tahun 2022 : 1.572,23 Ton
- Produksi Perikanan Tahun 2023 : 2.905,66 Ton

Persentase peningkatan produksi perikanan dapat dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Peningkatan Produksi Perikanan} = \frac{\text{Produksi Tahun } n - \text{Produksi Tahun}(n-1)}{\text{Produksi Tahun } (n-1)} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian peningkatan produksi perikanan Tahun 2023 sebesar 0,85% dari target 0,5%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja indicator sasaran peningkatan produksi perikanan Sangat Berhasil (170%)

Selain meningkatkan produksi perikanan, upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan 4 RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan juga menetapkan tujuan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sektor Unggulan yang dijabarkan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat dengan indicator sasaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Skor PPH dapat diperoleh dengan formulasi seperti berikut :

$$\text{PPH} = \% \text{ Angka Kecukupan Energi (AKE)} \times \text{Bobot masing-masing Kelompok Pangan}$$

Dari hasil pendataan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan bahwa capaian Skor PPH Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Perhitungan Skor PPH

No	Unsur Jenis Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				
		Persen AKE		Bobot		Skor PPH
1	Padi- padian	64,3	X	0,5	=	25
2	Umbi-umbian	3,9	X	0,5	=	2
3	Pangan Hewani	12,2	X	2,0	=	24
4	Minyak dan lemak	10,9	X	0,5	=	5
5	Buah biji berminyak	0,9	X	0,5	=	0,4
6	Kacang-kacangan	3,6	X	2,0	=	7,3
7	Gula	2,5	X	0,5	=	1,2
8	Sayuran dan Buah	7,5	X	5,0	=	30
9	Lain-lain	2,9	X	0,0	=	-
JUMLAH		108,7				94,9

Sumber : Buku Analisis Pola Konsumsi Pangan DKPKP Tahun 2023

Berdasarkan perhitungan diatas bahwa capaian Skor PPH Tahun 2023 adalah 94,90 dari target sebesar 80. Sehingga bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja indicator sasaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Sangat Berhasil (119%).

Tabel 18. Target dan Capaian Program

No	Program	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023			Predikat
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	%	0,30	1,02	340	Sangat Berhasil
2	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	%	0,20	0,10	52	Cukup Berhasil
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Usaha Perikanan Darat yang memenuhi Ketentuan (%)	%	5	0	0	Tidak Berhasil
4	Program	Persentase	%	90	33	37	Tidak

	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan Pasar Terhadap Produksi Hasil Perikanan (%)					Berhasil
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan (%)	%	8	0	0	Tidak Berhasil
6	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (kkal/kapita)	Kkal/kapita	2.100	2.259	108	Sangat Berhasil
		Angka Kecukupan Protein (gr/kapita)	Gr/kapita	57	67	110	Sangat Berhasil
7	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan (%)	%	4	1,08	27	Tidak Berhasil
8	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Aman	%	60	1	1,67	Tidak Berhasil
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	90	90	100	Sangat Berhasil
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	90	90	100	Sangat Berhasil
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	90	90	100	Sangat Berhasil
		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	90	90	100	Sangat Berhasil

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kinerja didukung oleh beberapa program dan kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

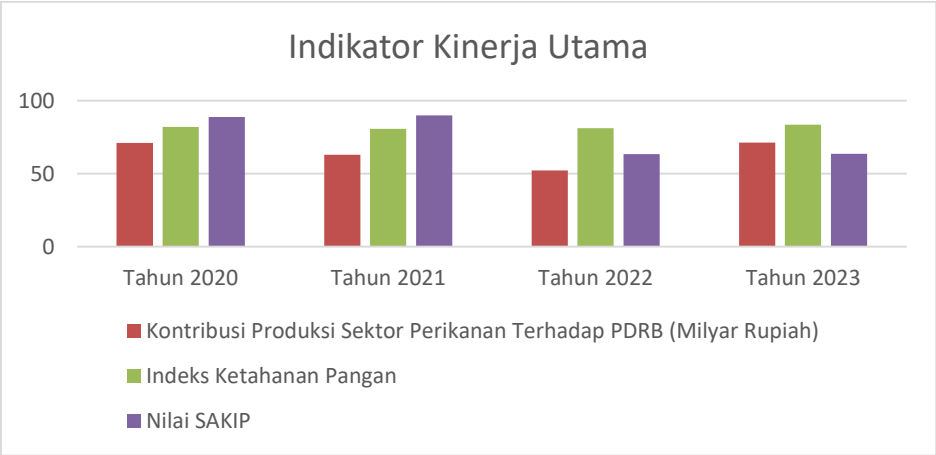
Berdasarkan target dan capaian program, beberapa program memiliki capaian Sangat Berhasil (> 80%) diantaranya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan program yang memiliki capaian Tidak Berhasil (< 50%) diantaranya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Program Pengawasan Keamanan Pangan.

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022, Tahun 2021 dan Tahun 2020

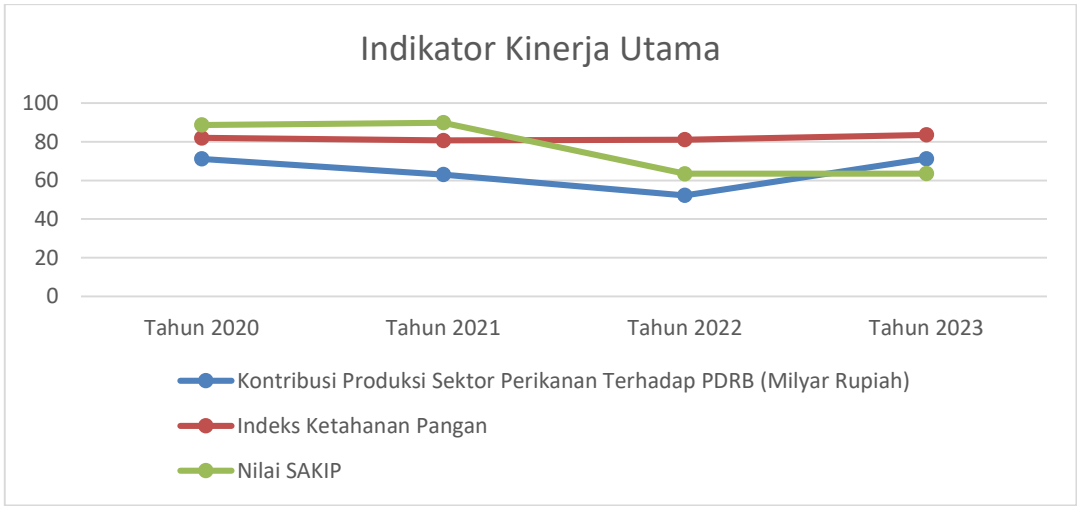
Cara yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja yaitu membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indicator kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya (2020-2022). Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai SKPD. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022, Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan dalam table berikut

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Milyar Rupiah)	71.12	63.07	52.33	71.21
2	Indeks Ketahanan Pangan	81,99	80,64	81,12	83,57
3	Nilai SAKIP	88,75 (A)	89,90 (A)	63,45 (B)	63,55 (B)



Gambar 1. Diagram Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama



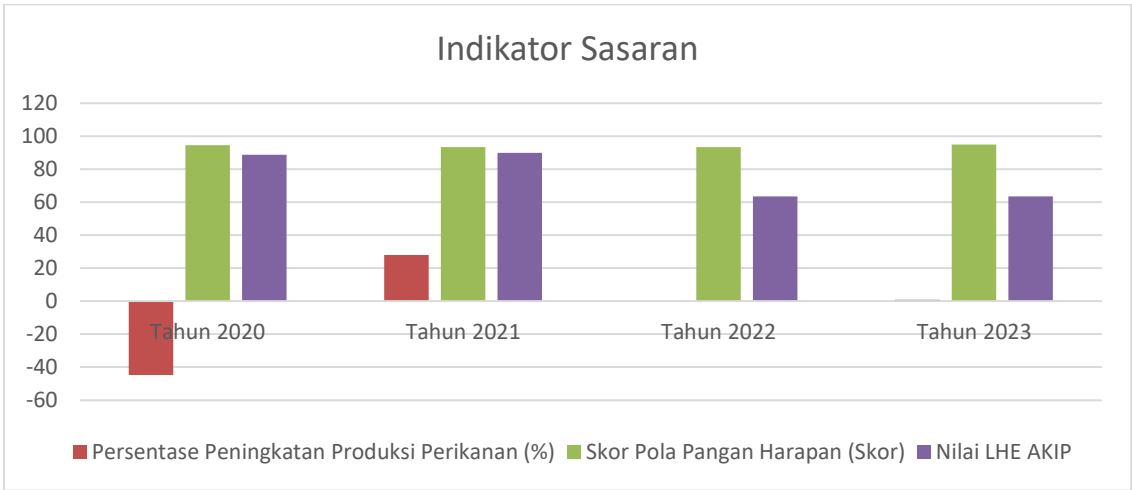
Gambar 2. Grafik Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan data perbandingan realisasi diatas, Nilai Kontribusi Produksi Sektor Perikanan terhadap PDRB Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu Rp. 63.072.381.353 (2021) dan Rp. 52.328.566.013 (2022).

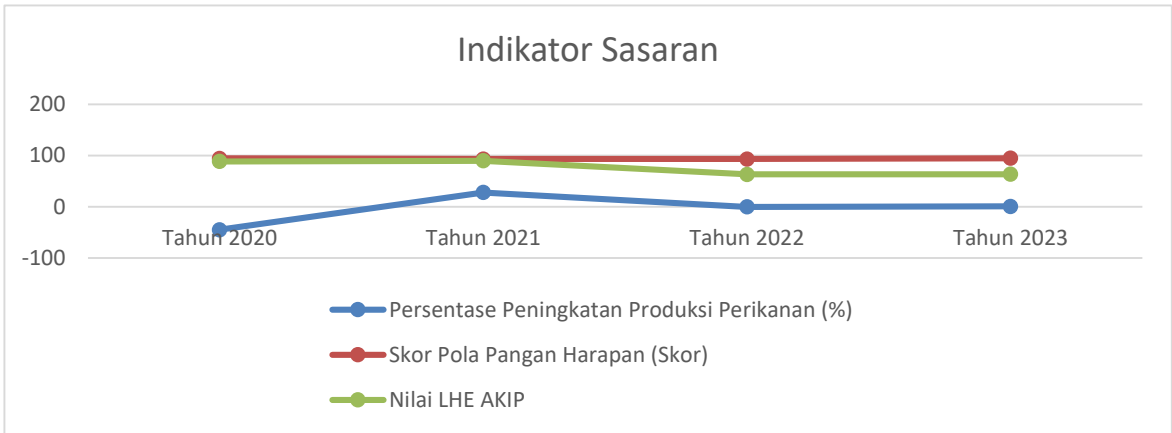
Nilai Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 80,64 (2021) dan 81,12 (2022). Sedangkan capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan pada Tahun 2021 sebesar 89,90, Tahun 2022 sebesar 63,45 dan Tahun 2023 sebesar 63,55.

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran

No	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	-44,71	27,96	-0,19	0,85
2	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	94,50	93,40	93,30	94,90
3	Nilai LHE AKIP	88,75 (A)	89,90 (A)	63,45 (B)	63,55 (B)



Gambar 3. Diagram Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran



Gambar 4. Grafik Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran

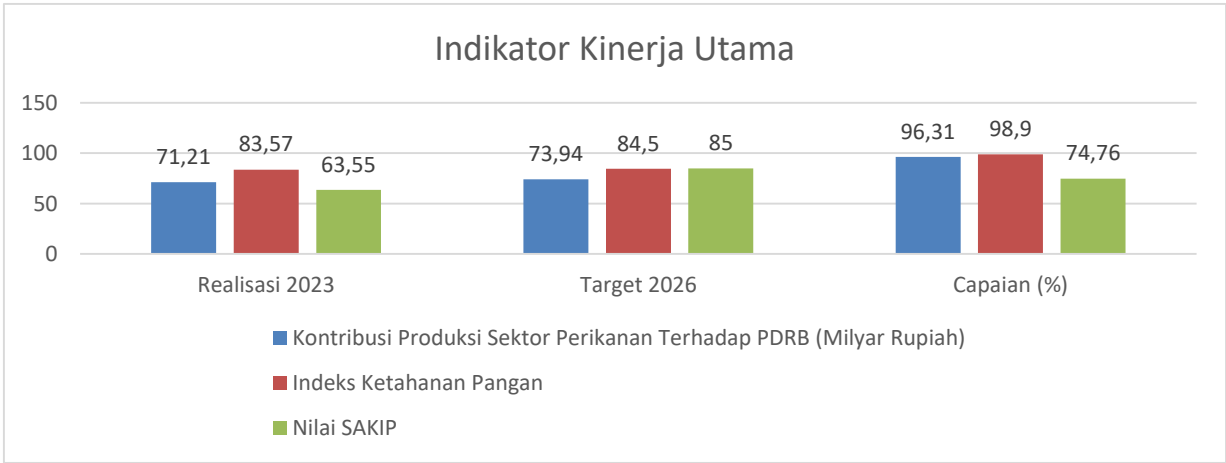
Berdasarkan data perbandingan realisasi indicator sasaran diatas, diketahui bahwa pada Tahun 2021 terjadi peningkatan produksi perikanan sebesar 27,96% dan mengalami penurunan pada Tahun 2022 sebesar -0,19% serta mengalami peningkatan Kembali pada Tahun 2023 sebesar 0,85%. Sedangkan Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 93,40 (2021) dan 93,30 (2022)

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Terkait dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dan target akhir Perubahan Renstra Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2026	Capaian (%)
1	Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Milyar Rupiah)	71.21	73,94	96,31
2	Indeks Ketahanan Pangan	83,57	84,5	98,90
3	Nilai SAKIP	63,55 (B)	85	74,76

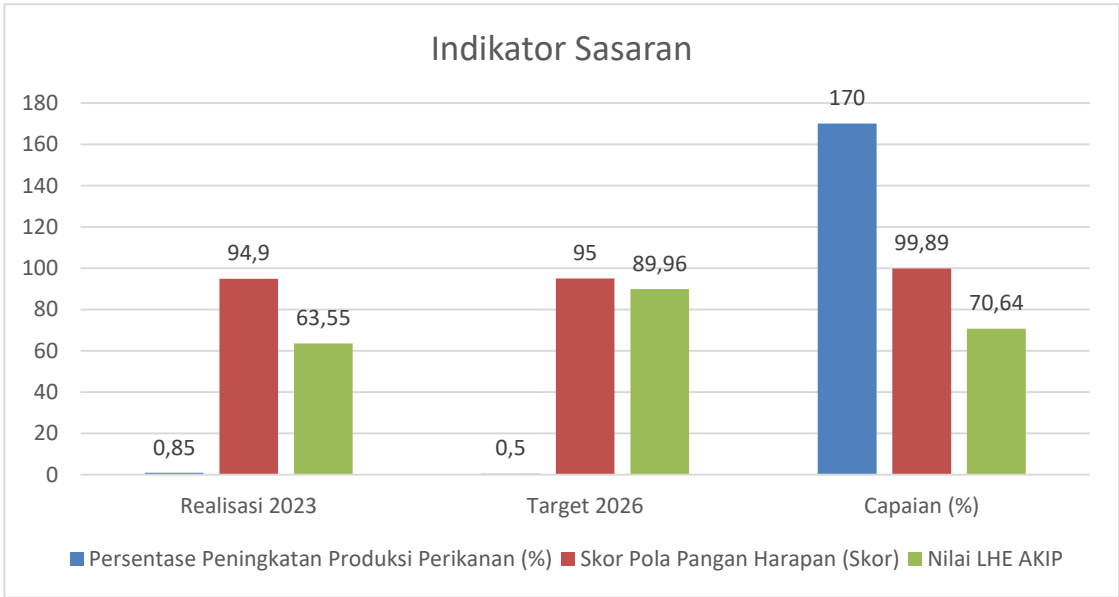


Gambar 5. Diagram Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa capaian kontribusi pada Tahun 2023 sebesar Rp. 71.218.685.419,- dari target akhir pada Tahun 2026 sebesar Rp. 73.940.000.000,- atau sekitar 96,31%. Sehingga masih ada kekurangan sekitar 3,69%. Sedangkan Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 sebesar 83,57 dari target akhir pada Tahun 2026 sebesar 84,5 atau sekitar 98,9%.

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	Target 2026	Capaian (%)
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	0,85	0,5	170
2	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	94,90	95,00	99,89
3	Nilai LHE AKIP	63,55 (B)	89,96	70,64



Gambar 6. Diagram Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa realisasi Persentase Peningkatan Produksi Perikanan sebesar 0,85% dari target akhir peningkatan pada Tahun 2026 sebesar 0,5%. Dengan demikian capaian Tahun 2023 telah melampaui target akhir. Sedangkan realisasi Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2023 sebesar 94,9 dari target akhir pada Tahun 2026 sebesar 95,00 atau sekitar 99,89% yang artinya hampir mencapai target akhir.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Propinsi dan Nasional

Terkait dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan Propinsi Jawa Barat dan Nasional disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 23. Perbandingan Capaian Indeks Ketahanan Pangan

No	Indeks Ketahanan Pangan	Capaian 2023
1	Kabupaten Pangandaran	83,57
2	Jawa Barat	82,19
3	Nasional	71,57

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa realisasi Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 adalah 83,57. Capaian ini melebihi capaian Indeks Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Barat sebesar 82,19 dan Nasional sebesar 71,57

Tabel 24. Perbandingan Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

No	Skor Pola Pangan Harapan	Capaian 2023
1	Kabupaten Pangandaran	94,9
2	Jawa Barat	93,8
3	Nasional	94,1

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa realisasi Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 adalah 94,9. Capaian ini melebihi capaian Indeks Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Barat sebesar 93,8 dan Nasional sebesar 94,1.

3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian indikator kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan ketahanan Pangan Tahun 2023, diperoleh informasi bahwa capaian kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan ketahanan Pangan tahun 2023 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan beberapa indikator kinerja capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Namun ada juga beberapa program yang memiliki capaian dibawah 50%. Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dengan menjabarkan hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan dan penurunan kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran adalah:

- 1. Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Milyar Rupiah)
 - Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB antara lain :
 - a. Jenis ikan yang ditangkap nelayan merupakan jenis ikan bernilai ekonomis

- tinggi, diantaranya Bawal Putih, Lobster, Layur yang merupakan komoditas ekspor;
- b. Pencatatan produksi baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya sudah berjalan dengan baik;
 - c. Kegiatan Pengawasan produksi perikanan tangkap serta pengawasan sumberdaya ikan;
 - d. Adanya peningkatan kapasitas baik pembudidaya maupun nelayan melalui Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Terealisasinya program-program bantuan penyediaan induk ikan, benih ikan dan pakan/alat pencetak pakan untuk kelompok pembudidaya ikan serta restocking ikan di perairan umum;
- Kendala dalam mencapai sasaran tujuan diantaranya :
- a. Masih terdapat beberapa kapal perikanan yang berukuran > 5GT yang belum beroperasi secara maksimal;
 - b. Masih terdapat transaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan di luar Tempat Pelelangan Ikan sehingga produksi hasil tangkapan masih ada yang tidak tercatat (unreported fishing);
 - c. Faktor cuaca yang ekstrim sehingga menghambat kegiatan penangkapan ikan;
 - d. Terjadinya kematian benih ikan yang disebabkan menurunnya kualitas air pada musim hujan dan menurunnya ketersediaan/stok air pada musim kemarau;
 - e. Adanya kecenderungan nelayan memilih untuk menangkap Benih Bening Lobster (BBL) dibandingkan menangkap ikan jenis lain, sedangkan di lain sisi produksi Benih Bening Lobster (BBL) tidak dapat dicatat karena tidak sesuai dengan aturan perundangan;
 - f. Sertifikasi produk yang masih sedikit di minati pelaku UKM dan POKLAHSAR.
- Upaya pemecahan masalah yang dilakukan antara lain :
- a. Monitoring dan Evaluasi transaksi jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - b. Pengawasan secara terus menerus dan berkelanjutan terhadap aktivitas unreported fishing dengan mengoptimalkan peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) serta berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Polair dan stakeholder terkait lainnya;
 - c. Sosialisasi Peraturan yang berlaku;
 - d. Penyediaan sarana prasarana perikanan budidaya baik di Balai Benih Ikan maupun di masyarakat seperti sumur bor, pompanisasi dan alat pengukur kualitas air;
 - e. Terbitnya regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10

Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;

- f. Memberikan pelatihan dan skema alur pengajuan sertifikasi kepada pelaku usaha.

2. Indeks Ketahanan Pangan

- Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Indeks Ketahanan Pangan antara lain :
 - a. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya aplikasi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. Tersedianya pangan yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang cukup dan berkualitas baik, serta dapat diakses dan dimanfaatkan secara mudah untuk dikonsumsi;
 - c. Meningkatnya daya beli masyarakat untuk memperoleh pangan yang beragam jenis dan seimbang gizinya untuk dikonsumsi;
 - d. Tercapainya target realisasi skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Pangandaran tidak terlepas realisasinya dari terlaksananya berbagai program peningkatan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran;
 - e. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penyediaan anggaran untuk mendukung program ataupun kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis skor Pola Pangan Harapan (PPH).
- Kendala dalam mencapai sasaran tujuan diantaranya :
 - a. Masih tingginya konsumsi karbohidrat yang bersumber dari beras dan tepung terigu, sementara konsumsi karbohidrat dari bahan pangan lainnya seperti jagung, dan kelompok umbi-umbian meliputi singkong, ubi jalar, kentang, dan ubi lainnya masih rendah;
 - b. Masih tingginya konsumsi lemak, terutama dari jenis minyak lainnya (minyak sawit dan lain-lain) yang tidak diproduksi di dalam daerah;
 - c. Masih rendahnya konsumsi protein nabati yang berasal dari kelompok kacang-kacangan, meliputi kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang lainnya;
 - d. Masih rendahnya konsumsi pada kelompok buah/biji berminyak yang meliputi kelapa dan kemiri;
 - e. Masih rendahnya konsumsi pada kelompok gula yang meliputi gula pasir dan gula merah;
 - f. Masih adanya desa yang termasuk kategori rentan rawan pangan.
- Upaya pemecahan masalah yang dilakukan antara lain :

- a. Digencarkannya program percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan melalui sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) baik di Kecamatan, Desa Lokus *Stunting*, maupun sekolah;
- b. Pemberdayaan TP PKK Kecamatan untuk memberikan edukasi hingga tingkat rumah tangga tentang menu makan harian yang memenuhi kaidah B2SA melalui penyelenggaraan rangkaian acara Lomba Cipta Menu (LCM) Tk. Kabupaten Pangandaran;
- c. Terlaksananya program pelatihan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal, sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat untuk dapat menerapkan gerakan diversifikasi pangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut bekerjasama dengan ICA (*Indonesian Chef Association*) untuk menciptakan kreasi menu olahan pangan lokal yang dapat diterima dan disukai oleh masyarakat;
- d. Penyusunan kebijakan terkait percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Tingkat Kabupaten Pangandaran, seperti Surat Edaran yang mewajibkan tersedianya olahan pangan lokal dalam setiap makanan dan *snack* rapat maupun acara kedinasan lainnya;
- e. Tersedianya program yang mendukung ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat (LPM);
- f. Terlaksananya intervensi berupa pemberian bantuan paket bahan pangan untuk masyarakat di desa rentan rawan pangan;
- g. Adanya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk daerah yang rawan terjadi bencana, seperti banjir;
- h. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk penanganan gizi kurang dan *stunting* pada balita;
- i. Pembinaan kepada seluruh kelompok penerima manfaat program ketahanan pangan terkait penerapan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), penerapan gerakan diversifikasi pangan untuk memanfaatkan pangan lokal, serta agar berperan aktif mengantisipasi dan menangani kondisi rawan pangan di daerahnya

3. Nilai AKIP

- Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja antara lain :
 - a. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah.
 - b. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.

4. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan

Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan persentase produksi perikanan:

- a. Pencatatan produksi baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya

- sudah berjalan dengan baik;
- b. Kegiatan Pengawasan produksi perikanan tangkap serta pengawasan sumberdaya ikan;
- c. Adanya peningkatan kapasitas baik pembudidaya maupun nelayan melalui Pendidikan dan Pelatihan;

Kendala dalam mencapai sasaran tujuan diantaranya :

- a. Masih terdapat beberapa kapal perikanan yang berukuran > 5GT yang belum beroperasi secara maksimal;
- b. Masih terdapat transaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan di luar Tempat Pelelangan Ikan sehingga produksi hasil tangkapan masih ada yang tidak tercatat (unreported fishing);
- c. Faktor cuaca yang ekstrim sehingga menghambat kegiatan penangkapan ikan;

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan antara lain :

- a. Monitoring dan Evaluasi transaksi jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- b. Pengawasan secara terus menerus dan berkelanjutan terhadap aktivitas unreported fishing dengan mengoptimalkan peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) serta berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Polair dan stakeholder terkait lainnya;
- c. Sosialisasi Peraturan yang berlaku;
- d. Penyediaan sarana prasarana perikanan budidaya baik di Balai Benih Ikan maupun di masyarakat seperti sumur bor, pompanisasi dan alat pengukur kualitas air;
- e. Terbitnya regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;

5. Skor Pola Pangan Harapan

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Skor Pola Pangan Harapan antara lain :

- a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
- b. Tersedianya pangan yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang cukup dan berkualitas baik serta dapat diakses dan dimanfaatkan secara mudah untuk dikonsumsi masyarakat.

Kendala dalam mencapai sasaran diantaranya :

- a. Daya beli masyarakat yang belum optimal untuk memenuhi kebutuhan dikarenakan oleh pendapatan masyarakat yang masih kurang.
- b. Ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Pangandaran mayoritas diperoleh dari luar daerah sehingga memperpanjang rantai pasok yang menyebabkan harga

pangan di Kabupaten Pangandaran cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah produsen.

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan antara lain :

- a. Mengadakan Operasi Pasar untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan utama
- b. Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin
- c. Melakukan sosialisasi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, sehat dan aman

6. Nilai LHE AKIP DKPKP

Faktor yang menyebabkan tercapainya Nilai LHE AKIP DKPKP antara lain adanya komitmen seluruh pegawai dalam memperbaiki kualitas dan pemanfaatan perencanaan kinerja, melakukan evaluasi dan pengumpulan data secara rutin melalui pemanfaatan aplikasi SiGenah, melakukan publikasi seluruh informasi tentang perencanaan melalui website OPD dan E-Sakip serta menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya serta melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal

3.3 AKUNTABILITAS ANGGARAN

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, jumlah pendanaan yang dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran adalah sebesar Rp 14.713.533.236,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp. 7.586.347.381,00 atau sebesar 51,56%. Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Anggaran dan Realisasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.292.160.135,00	3.338.139.306,00	77,77
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	5.979.455.917,00	2.270.242.750,00	37,97
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.721.362.644,00	1.533.361.102,00	41,20
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.248.250,00	16.248.250	100,00
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	123.414.950,00	121.463.950,00	98,42
6	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN	252.881.217,00	12.040.000,00	4,76

	KEMANDIRIAN PANGAN			
7	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	203.093.323,00	183.935.223,00	79,19
8	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	111.960.800,00	97.960.800,00	87,50
9	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	12.956.000,00	12.956.000,00	100,00
JUMLAH		14.713.533.236,00	7.586.347.381,00	51,56 %

Untuk mengetahui tingkat efektifitas akuntabilitas keuangan dapat menggunakan rumus rasio efektivitas berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran tersebut menggunakan kategori nilai sebagai berikut :

- (1) Sangat tidak efektif (0 – 40%)
- (2) Tidak efektif (40% - 60%)
- (3) Cukup efektif (60% - 80%)
- (4) Efektif (80% - 100%)
- (5) Sangat efektif (> 100%)

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 51,56% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja berada pada kategori Tidak Efektif.

Keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan tersebut selain atas dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten juga terdapat program/kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi serta APBN Pusat yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Pangandaran sehingga dapat menjadi pendorong terhadap keberhasilan pencapaian indikator sasaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Program/kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi serta APBN Pusat tersebut antara lain sebagai berikut :

Tabel 26. Daftar Kegiatan dan Sumber Anggaran

No.	Bidang / Kegiatan	Sumber Anggaran
A	Bidang Perikanan Tangkap	
1	Pengadaan Mesin Kapal Penangkapan Ikan	APBN
2	Pengadaan Timbangan	APBN
3	Fasilitasi Program Kampung Nelayan Maju (KALAJU)	APBN
4	Fasilitiasi Bantuan Mesin Kapal Perikanan	APBN
5	Fasilitasi Bantuan API	APBN
6	Pembangunan Aula Edukasi Mangrove	CSR

7	Pembangunan Jogging Track Mangrove	APBN
8	Smartfishing	APBD I
9	Penanaman Mangrove dan Vegerasi pantai	CSR, Lembaga Pendidikan, APBD I, dan APBN
10	Rehabilitasi TPI Legokjawa	APBD II
11	Pemeliharaan ringan TPI Batukaras, TPI Ciawitali dan TPI Nusawiru	APBN
B	Bidang Perikanan Budidaya	
1	Restocking benih ikan tawes dan nilem	APBD I
2	Pembangunan/Rehabilitasi Kolam Ikan di BBI Cimerak Kabupaten Pangandaran	APBD I
3	Pengadaan Induk Ikan Nila, Pakan Benih & Pakan Induk Nila - Pengadaan Sarana Produksi Ikan di Balai Benih Ikan Cimerak Kabupaten Pangandaran	APBD I
4	Pengadaan Mobil Operasional BBI (Pengangkut Benih Ikan Hidup) - Pengadaan Sarana Produksi Ikan di Balai Benih Ikan Cimerak Kabupaten Pangandaran	APBD I
5	Pengadaan Mobil Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan - Pengadaan Sarana Produksi Ikan di Balai Benih Ikan Cimerak Kabupaten Pangandaran	APBD I
6	Pengadaan Peralatan Pengangkut Benih ikan - Pengadaan Sarana Produksi Ikan di Balai Benih Ikan Cimerak Kabupaten Pangandaran	APBD I
7	Pengadaan Peralatan Pembenihan Kepiting - Pengembangan Kampung Kepiting	APBD I
8	Pengadaan Bangunan Pembenihan Kepiting - Pengembangan Kampung Kepiting	APBD I
9	Pengadaan Pompa Pembenihan Kepiting - Pengembangan Kampung Kepiting	APBD I
10	Penyaluran Bantuan Peralatan Pengolah Hasil Perikanan	APBN
11	Penyaluran Bantuan Cool Box	APBN
12	Penyaluran Bantuan Chest Freezer	APBN
13	Penyaluran Bantuan Benih Kepiting	APBN
14	Penyaluran Bantuan Mesin Pompa Air	APBN
15	Penyaluran Bantuan Sarana Kincir Perikanan Budidaya	APBN
16	Penyaluran Bantuan Benih Kakap Putih	APBN
17	Penyaluran Bantuan Bioflok	APBN
18	Penyaluran Bantuan Excavator	APBN
19	Penyaluran Bantuan Benih Bawal Bintang	APBN
C	Bidang Ketahanan Pangan	
1	Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	APBD I dan APBN
2	Penyaluran Bantuan Pangan berupa Daging ayam dan Telur ayam	APBN
3	Intervensi Pembagian Sembako dalam rangka Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	APBD I
4	Gerakan Pangan Murah (GPM)	APBD I dan APBN
5	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Nasional dan wilayah	Dekonsentrasi Provinsi
6	Koordinasi, Sosialisasi, bimtek, Monev dan pelaporan ketersediaan pangan	Dekonsentrasi Provinsi

7	Fasilitasi penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan kerentanan pangan (FSVA) Kab Kota	Dekonsentrasi Provinsi
8	Data dan informasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi kab kota	Dekonsentrasi Provinsi
9	Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dekonsentrasi Provinsi
10	Penguatan Cadangan Pangan Nasional	Dekonsentrasi Provinsi
11	Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Dekonsentrasi Provinsi
12	Registrasi Keamanan Pangan Segar	Dekonsentrasi Provinsi

3.4 EFISIENSI SUMBERDAYA

Berdasarkan tabel realisasi anggaran bahwa silpa Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 sebesar 48,44% atau setara dengan Rp. 7.127.185.855,-. Silpa tersebut merupakan hasil rasionalisasi anggaran serta kegiatan yang bisa di efektifkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran tahun 2023 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2023 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tujuan, kinerja sasaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan kabupaten Pangandaran tahun 2023 dengan 2 sasaran secara keseluruhan sangat berhasil.

Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. Program/kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi serta APBN
2. Data Lumbung Pangan Kabupaten Pangandaran
3. Data Kelompok Wanita Tani (KWT)
4. Data Kelompok Pembudidaya Ikan Kabupaten Pangandaran
5. Data GAPOKKAN Kabupaten Pangandaran
6. Data Poklahsar Kabupaten Pangandaran
7. Data KUB Kabupaten Pangandaran
8. Data Kelompok Usaha Garam Kabupaten Pangandaran
9. Data Koperasi Perikanan Kabupaten Pangandaran
10. Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta Target Tahunannya
11. Perjanjian Kinerja Esselon II dan Esselon III
12. Surat Keputusan Tim Penyusunan Laporan Kinerja